

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur diatur dalam “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015”. Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mengenai penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam pengelolaan sumber daya, salah satunya mengenai infrastruktur pengelolaan sektor pariwisata. Sektor pariwisata sangat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian negara, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan penguatan pariwisata di daerah – daerah yang berpotensi dalam sektor pariwisata.

Pariwisata menjadi daya tarik yang sangat luar biasa di negara – negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, dan dapat meningkatkan pendapatan negara selain dari pajak dan migas. Negara Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mempunyai potensi sumber daya alam untuk dijadikan obyek wisata dan berbagai macam kultur kebudayaan. Pada tahun 2018 Indonesia mempromosikan obyek wisata alam dan kebudayaan yang dimilikinya kepada negara asing, untuk menjadi daya tarik pengunjung wisatawan dari mancanegara sehingga pendapatan yang didapat tidak hanya dari dalam negeri saja tetapi juga dari devisa, selain itu sehingga dapat menambah pendapatan negara.

Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Sleman berdasarkan “Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatawan Daerah Tahun 2015 – 2025, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan obyek wisata dan berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha (pihak swasta), dan pemerintah”. Dalam pembangunan dan pemasaran pariwisata dibutuhkan kerjasama terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan pemerintah dan sektor swasta.

Kabupaten Sleman yang berada di Utara Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kawasan pariwisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, sehingga terjadi peningkatan pengunjung di setiap tahunnya. Pengembangan pariwisata di kawasan Gardu Pandang Kaliurang ini yang berkonsep “ *Even Festival Of Light Kaliurang*” menjadi daya tarik pengunjung untuk berkunjung dan menikmati pertunjukan.

Berdasarkan data statistik pengunjung wisatawan di Kabupaten Sleman akhir bulan Desember 2017 yaitu sebanyak 6.390.962, dengan perincian kunjungan sebanyak 6.068.780 wisatawan nusantara (95,41%), wisatawan mancanegara sebanyak 292.180 setara sama dengan (4,59%). Jika dibandingkan dengan wisatawan tahun 2016, terjadi peningkatan kunjungan dalam tahun 2017, jika dilihat kenaikannya sampai dengan 137,54% dari 4.624.904 pengunjung. Ini merupakan suatu peningkatan yang signifikan dalam keberhasilan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan, pemanfaatan

sektor pariwisata dan upaya menggunakan sumber daya yang dimiliki di kawasan kabupaten sleman. (Badan Pusat Statistik, 2017) .

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mulai bekerjasama berbasis jejaring dengan PT. Cikal Bintang Bangsa selaku pengelola Taman Pelangi dimulai sejak tahun 2015. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman melakukan proses jejaring pada *Event Festival Of Light Kaliurang* dengan PT. Cikal Bintang Bangsa bertujuan untuk meningkatkan pengunjung wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung di Gardu Pandang Kaliurang, karena melihat kondisi lokasi tersebut sepi dan belum ada obyek wisata di malam hari, dan untuk meningkatkan pendapatan daerah (Santosa, 2016). Obyek wisata *Event Festival Of Light Kaliurang* yang akan diadakan setiap dua kali dalam satu tahun yaitu pada saat libur lebaran periode juni dan juli, dan liburan natal periode desember dan januari.

Tabel: 1.1

Data Kunjungan Gardu Pandang Kaliurang sesudah adanya *Festival Of Light* tahun 2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Pengunjung	76.341	82.796	102.358	98.333	108.771
Presentasi Peningkatan	2.05%	4.02%	7.48%	-4.09%	9.21%

Sumber: Data Kunjungan Gardu Pandang Kaliurang (Santosa, 2016)

Berdasarkan tabel diatas mengenai data kunjungan kawasan Gardu Pandang Kaliurang setelah adanya *Event Festival Of Light* mengalami peningkatan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Ini merupakan suatu keberhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman untuk menciptakan obyek wisata di malam hari dengan hiasan lampion dan tema yang berbeda – beda disetiap tahunnya.

Proses kerjasama jejaring antara pemangku kepentingan (*stakeholder*), dengan upaya pengelolaan sektor pariwisata terjadi karena saling membutuhkan satu sama lain untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas untuk masyarakat. Namun karena dari pihak pemerintah daerah sendiri mengakui adanya keterbatasan dalam penyediaan modal untuk mengelola pariwisata daerah. Oleh karena itu, terjalin proses kerjasama dengan pihak swasta yang mempunyai modal untuk pengelolaan dan pengembangan wisata *Festival Of Light Kaliurang*. Proses jejaring yang terjalin antara pemerintah daerah dan sektor swasta biasa disebut dengan *Public Private Partnersip (PPP)*.

Public Private Partnership (PPP) menurut Sekretariat A4DE 2012 dalam (Masitoh, 2014), disebut juga dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan suatu pembiayaan alternatif dalam pemberian pengadaan pelayanan publik yang digunakan secara luas di berbagai seluruh negara maju. *Public Private Partnership (PPP)* yaitu kontak kerjasama jangka panjang dalam pembangunan dan pengembangan pelayanan publik dengan suatu badan pemerintah yang menjadi regulator, dan suatu pihak sektor swasta sebagai

pemilik modal dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama suatu proyek dari design, kontruksi, pemeliharaan, dan operasional lainnya (Dwinanta Utami, 2010).

Data Pengunjung obyek wisata *Event Festival Of Light Kaliurang* mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2015 sampai dengan 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan dari mancanegara ke kaliurang. Tahun 2015 - 2016 periode Desember sampai dengan Januari sebanyak 53.506 pengunjung. Kemudian di tahun 2016 – 2017 periode Desember sampai dengan Januari sebanyak 57.951 pengunjung. Tahun 2017 periode Juni sampai dengan Juli sebanyak 122.575 pengunjung (Dinas Pariwisata Sleman, 2018).

Bapak Kus Endarto selaku Kepala Bidang Pemasaran di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mengatakan bahwa data pengunjung obyek wisata *Event Festival Of Light Kaliurang* di tahun 2018 mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun 2017. Dengan begitu, secara otomatis pengunjung Gardu Pandang Kaliurang, dan penginapan hotel atau homestay juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya persiapan dan adanya permasalahan serta kendala dalam membuat perencanaan program tersebut. Adapun Obyek wisata *Event Festival Of Light Kaliurang* ini di setiap *event* dan tahun memiliki tema yang berbeda – beda untuk menjadi daya tarik pengunjung.

Dengan melihat pernyataan tersebut, diketahui bahwa adanya suatu permasalahan dan kendala dalam proses melakukan jejaring yang mempengaruhi penurunan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata *Event Festival Of Light Kaliurang*. Oleh karena itu, penelitian ini ingin meneliti dan mengetahui proses jejaring yang dilakukan, dan pola hubungan diantara kedua pihak pemangku kepentingan (*Stakeholder*).

Mewujudkan tata kelola pariwisata yang baik, membutuhkan suatu proses kerjasama diantara kedua pihak untuk merancang konsep – konsep secara spesifik dan matang. Selain itu, dapat menawarkan konsep yang berbeda dengan konsep wisata pada umumnya, sehingga dapat menarik banyak para pengunjung nusantara maupun mancanegara. proses kerjasama jejaring membutuhkan aktor yang bertanggung jawab, saling menguatkan dan saling menguntungkan satu sama lain dalam kerjasama jejaring yang terjalin. Dalam mengelola pelayanan publik yang baik dan berkualitas itu membutuhkan hubungan komunikasi antara aktor pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, oleh karena itu dapat dijadikan suatu rumusan masalah dalam proses jejaring (*networking*) pemerintah dan swasta sebagai basis penguatan sektor pariwisata “ *Even Festival Of Light Kaliurang* ” yaitu:

1. Bagaimana proses jejaring (*networking*) antara pemerintah dan swasta sebagai basis penguatan sektor pariwisata di *Event Festival Of Light Kaliurang* ?
2. Bagaimana pola hubungan jejaring diantara pemerintah dengan swasta (PT. Cikal Bintang Bangsa) sebagai basis penguatan sektor pariwisata di *Event Festival Of Light Kaliurang* ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses jejaring (*networking*) yang terjalin sebagai basis penguatan sektor pariwisata di *Event Festival Of Light Kaliurang* Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui pola hubungan proses jejaring diantara stakeholder yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

1.1 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dalam penguatan pariwisata daerah bagi pemerintah dan swasta dalam proses jejaring (*networking*) dan pola hubungan antara pemerintah dan swasta, khususnya pariwisata daerah kabupaten sleman pada *event festival of light kaliurang*.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi bagi pemerintah dan swasta dalam memperbaiki dan memaksimalkan penguatan pariwisata daerah berbasis jejaring khususnya di daerah kabupaten sleman pada *even festival of light kaliurang*.

1.5 Tinjauan Pustaka

No	Judul	Nama & Tahun	Isi	Kelebihan dan Kekurangan
1	Analisis Pemetaan Jejaring <i>Stakeholder</i> Pariwisata di Kota Batu dengan Menggunakan Metode <i>Social Network Analysis (SNA)</i>	Rhiki Pratama, Mohammad Iqbal, (2018)	Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa: Pemetaan jejaring <i>stakeholder</i> terdapat delapan belas aktor kepentingan (<i>stakeholder</i>) di pariwisata Kota Batu, delapan aktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun	Penelitian ini mempunyai kelebihan yaitu bisa memaparkan tipe hubungan dan derajat hubungan <i>stakeholder</i> dari delapan <i>stakeholder</i> . Data yang diperoleh dengan melakukan interview 28 narasumber. Dengan begitu data yang

			<p>mengukur permasalahan menggunakan teori peta jejaring dan <i>Social Network Analysis (SNA)</i> yang meliputi ;</p> <p>1) <i>degree centrality</i> hasil temuan dilapangan yaitu ternyata travel agen yang memiliki nilai <i>degree</i> nya paling tinggi dan berperan dalam berkomunikasi kepada aktor – aktor lainnya pada melakukan jejaring.</p> <p>2) <i>closeness centrality</i>, yaitu mengukur jarak rata – rata dalam penerima dan penyebar informasi dari aktor satu ke aktor lainnya. Penilaian tertinggi dalam derajat hubungan <i>in closeness</i> yaitu makelar. Sedangkan derajat hubungan <i>out closeness</i> yaitu POKDARWIS, UMKM</p> <p>3) <i>betweenness centrality</i>. yaitu mengukur aktor – aktor dalam penghubung pada pemetaan jejaring ini yaitu Dinas Pariwisata dan agen travel yang berperan menjadi fasilitator.</p>	<p>diperoleh sangat beraneka ragam, akurat, dan jelas.</p> <p>Kekurangan yang masih dapat dilihat dari penelitian ini adalah hanya berorientasi pada pemetaan jejaring (hubungan stakeholder) dengan <i>ekploratory research</i>. Konsep jejaring sendiri sebenarnya bisa lebih luas lagi untuk proses jejaring itu sendiri. Selain itu, penelitian ini yaitu, penulis tidak menampilkan studi terdahulu. Sehingga tidak dapat membandingkannya.</p>
2	Konsep Jejaring Destinasi Pariwisata Metropolitan Kepulauan di Batam , Bintan, dan Karimun.	Nurul Nadji, Wiendu Nuryanti, Budi Prayitno, Nindy Soewarno, (2015)	<p>Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa: kepulauan ini memiliki potensi pariwisata, tetapi ketiga kepulauan ini memiliki karakteristik yang berbeda – beda dalam pengembangan wisata.</p> <p>Potensi jenis pariwisata di Batam, Bintan dan</p>	<p>Penelitian ini memiliki keunggulan bisa merumuskan konsep jejaring untuk pengembangan ketiga kepulauan tersebut, dan diikuti dengan teori pariwisata, metropolitan kepulauan. Kekurangan yang masih dapat dilihat dari penelitian ini adalah</p>

			<p>Karimun bertujuan untuk mendapatkan struktur pengembangan daerah tujuan wisata. jaringan yang tepat konsep dalam pengembangan pulau tujuan wisata metropolitan. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan obeservasi langsung.</p>	<p>hanya fokus pada potensi pariwisata pada potensi wilayah tersebut. Padahal bisa di teliti lebih luas dengan mengaitkan teori jejaring dalam konteks kepulauan. penulis tidak menjelaskan lebih mendalam terkait teori yang digunakan dan indikatornya. Selain itu dibagian kesimpulan terlalu sedikit dalam menyimpulkan.</p>
3	<p>Analisis Jaejaring Agen Perubahan Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukatif</p>	<p>Nasyikhatur Rohmah, M. Ishom, (2016)</p>	<p>Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa: Desa Gubugklakah memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, sehingga agen peubahan yang terdiri dari aktor masyarakat dan pemuda sekitar memiliki inovasi untuk mengembangkan potensi alam yang ada dan bisa bermanfaat serta dikenal oleh masyarakat luas seperti desa wisata edukatif. Oleh karena itu, Lembaga Desa Wisata (LADESTA) membangun jejaring dengan beberapa stakeholder dalam mengembangkan potensi desa tersebut seperti; Lembaga Pemerintah Desa yang terdiri dari karang taruna, Badan Permusyawarahan Desa, PKK, Linmas, travel, dan juga di dukung oleh perangkat desa. Jejaring dengan pemerintah yaitu Dinas Pariwisata, Dinas</p>	<p>Penelitian ini memiliki kelebihan,karena dapat menjelaskan dengan rinci peran setiap aktor <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam kerjasama serta mendukung kesuksesan pengembangan desa wisata edukatif. Kekurangan dari penelitian ini adalah kurang menjelaskan mengenai teori jejaring (<i>Networking</i>). Selain itu juga tidak dijelaskan mengenai proses jejaring serta <i>impact</i> yang diterima oleh masyarakat dengan adanya Desa Wisata Edukatif.</p>

			Pertanian.	
4	Eksistensi Festival Of Light As A Tourism Icon Sleman Housing	Santosa, (2016)	Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan tujuan dari diselenggarakan obyek wisata <i>Festival Of Light</i> , kemudian mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam event tersebut. Adapun Pendapat dari masyarakat dalam penyelenggaraan <i>Festival Of Light</i> dianggap setuju karena data yang diperoleh mencapai 76%. Tetapi disini masyarakat kurang antusias dalam memfasilitasi lahan parkir untuk pengunjung. Promosi yang dilakukan dengan cara media online seperti instagram, facebook, twitter, radio jogja untuk meningkatkan kunjungan wisata ke kaliurang.	Penelitian ini memiliki kelebihan berupa penjelasan dan menggambarkan konsep strategi yang digunakan dalam pemasaran (<i>marketing</i>) obyek wisata <i>Festival Of Light</i> yaitu Branding, Advertising, Selling. Adapun faktor – fakto penghambat dan pendukung dalam penyelenggara obyek wisata tersebut. Kekurangan dari penelitian ini adalah kurang menjelaskan pilar <i>governance</i> dalam kerjasama diantara ketiga aktor yang bersangkutan.
5	Analisis <i>Public Private Partnership</i> Dalam Penegembangan Objek Wisata Telaga Sarangan Di Kabupaten Magetan	Nina Galih Pratiwi, Hardi warsono, (2018)	Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa: aktor pemangku kepentingan terdapat tujuh yang ikut berperan dalam pengembangan objek wisata telaga sarangan. Proses kerjasama ini ternyata masih terdapat hambatan yaitu masalah anggaran, bencana alam, dan sinkronisasi program. Hubungan antara masyarakat dengan pengusaha baru pada tahap <i>information network</i> , sedangkan pemerintah dan masyarakat samapai	Kelebihan dari jurnal ini, penulis dapat memaparkan di pembahasan penelitian dengan jelas mengenai permasalahan serta hambatan dalam melakukan kerjasama tersebut. Kekurangan dari penelitian ini, penulis tidak menjelaskan dan menjabarkan bentuk – bentuk dari <i>Public Private Public</i> .

			tahap <i>action network</i> . Bentuk kerjasama ini yaitu BOT dan BOO.	
6	Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota	Sri Mulyani, (2017)	Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa: Kerjasama kedua pihak mendorong terbitnya peraturan daerah untuk kasus pengelolaan lahan parkir di wisata taman kyai langgeng. Permasalahannya yaitu pada perebutan dalam pengelola lahan parkir serta tarif parkir antara swasta dan masyarakat sekitar. Kerjasama kedua pihak akan dibahas dengan menggunakan teori <i>Hollow State</i> yaitu tinjauan dari dimensi mekanisme, struktur dan insentif. Keuntungan yang dioperasionalkan untuk pihak swasta yaitu 30%, dan pengelola wisata 70%.	Kelebihan dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan dan menemukan cara yang inovatif dengan menggunakan teori <i>Hollow State</i> dalam kerjasama ini. Kekurangannya dari penelitian ini adalah kurang merumuskan model – model dari kerjasama pemerintah dan swasta dalam memberikan layanan publik seperti lahan parkir.
7	Sinergitas Pemerintah Dan Swasta Dalam perencanaan Strategi PengembanganWisata Daerah	Lailul Murshidah, Ismuhadi Heru Wijayanto, (2017)	Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa: Sinergitas pemerintah daerah dan swasta dikatakan cukup dari mulai perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan wisata daerah kabupaten lamongan. Hanya saja di empat tahun terakhir wisata bahari lamongan (WLB) mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini disebabkan karena kurangnya strategi dalam perencanaan. Padahal	Kelebihan dalam penelitian ini menampilkan konsep strategi dalam perencanaan obyek wisata yang meliputi perencanaan strategis, tujuan dalam pengembangan obyek wisata, sasaran, dan rencana aksi. Kemudian begitu banyak data yang menguatkan sebuah pendapat. Kekurangan dari penelitian ini adalah belum ada rumusan yang jelas tentang keterlibatan

			obyek WLB ini berkontribusi sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian kedua aktor kepentingan mengevaluasi dari penyebab penurunan pengunjung yaitu diakibatkan dari kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam hal kerjasama tersebut.	masyarakat dalam pengembanagan pariwisata daerah.
8	Kapasitas Jejaring stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata (Studi Kasus: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango)	Gilang Pamungkas. (2013)	Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa: adanya tiga perpektif utama dalam melihat ekowisata yaitu ekowisata pasar, produk, pengembangan. Adapun pengelolaan pariwisata termasuk ke dalam ekowisata pengembangan. Jejaring kerjasama memiliki kapasitas dalam hubungan yang saling menguntungkan diantara stakeholder. Kapasitas jejaring stakeholder dalam pengelolaan ekowisata dari segi sumber daya yaitu 82% anggota jejaring mampu mengindetifikasi yang dibutuhkan selama kerjasama.	Kelebihan dalam penelitian ini adalah dapat menjelaskan konsep, prinsip, tujuan melakukan jejaring stakeholder. Kekurangan dari penelitian ini adalah kurang pola hubungan jejaring dan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata berbasis jejaring.
9	Pola Kemitraan Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	Laras Ayu Andini, (2014)	Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa: Masih belum terlihat kemitraan yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Dalam kemitraan ini, pihak swasta tidak terlibat	Kelebihan dalam penelitian ini yaitu memaparkan data – data yang lengkap, menggunakan konsep networking dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan

			secara utuh, sehingga dari pemerintah yang menhandel semua. Kemudian masyarakat sekitar masih rendah dalam meningkatkan pengelolaan kawasan perkampungan budaya betawi.	wisata. Kekurangannya yaitu peneliti tidak memuliskan sebuah indikator dalam teori jejaring untuk mengukur pola hubungan stakeholder dalam sebuah kerjasama.
10	Sinergi Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung di Kabupaten Sleman	RR. E. Anggraeni Eksi wahyuni, (2014)	Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa: Sinergi kerjasama yang dilakukan oleh ketiga aktor tersebut aktif dan ikut serta berperan dalam porsinya masing – masing, sehingga rencana dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung berjalan sesuai dengan keinginan. Sinergitas kemitraan dari <i>Stakeholder</i> yaitu pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan stimulator. Sedangkan swasta sebagai penyedia layanan dan masyarakat berkontribusi dalam hal partisipasi pengembangan obyek wisata tersebut. Tetapi disini masyarakat masih belum sepenuhnya berkontribusi dalam pengembangan wisata.	Kelebihan dalam penelitian ini adalah sudah menjelaskan pola hubungan dalam pilar governance dari ketiga aktor kepentingan tersebut. Selain itu juga narasumber yang memadai sehingga dapat menunjang suatu keberhasilan dalam penelitian ini. Kekurangan dari penelitian ini adalah kurang menjelaskan proses sinergitas kemitraan. Hanya saja penelitian ini melihat dari segi hubungan diantara ketiga aktor.

Berdasarkan tinjauan terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu dari segi teori dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori jejaring (*networking*) untuk mengukur dalam menjawab sebuah

permasalahan yang terjadi. Penelitian ini ingin meneliti proses jejaring yang terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan Pihak Swasta (PT. Cikal Bintang Bangsa). Selain itu juga peneliti ingin mengetahui pola hubungan yang terjalin dalam proses jejaring tersebut.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1. Pariwisata

A. Definisi Pariwisata

Pariwisata adalah sesuatu yang kompleks dapat mempengaruhi sistem yang besar dan memiliki komponen seperti lingkungan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya (Sudana, 2013).

Definisi pariwisata menurut Fennel dalam (Sudana, 2013) menyatakan bahwa “ like spider’s web – touch one part of it and reverberations will be felt throughout”. Pariwisata yaitu seperti jaring laba – laba yang sistemnya berbagai macam dari elemen sehingga dapat mengikat seluruhnya.

Menurut “Undang – undang Kepariwisata No. 10 tahun 2009 yang berbunyi bahwa; Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, sektor swasta, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Pariwisata menurut Suwanto dalam (Puspitasari & Darmawan, 2017) adalah sebuah aktivitas sementara seseorang atau bahkan lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya.

Menurut Muhammad Ilyas dalam (Wibowo, 2015) pariwisata dapat di definisikan yaitu keseluruhan dari gejala – gejala yang mencangkup dalam seseorang yang bukan penduduk sekitar yang berdomisili di suatu tempat, dengan syarat seseorang tersebut tidak berdomisili di tempat tersebut untuk melakukan pekerjaan yang penting dan dapat memberikan suatu keuntungan baginya yang bersifat sementara atau permanen.

Menurut Meyres dalam (Zaenuri, 2018) mengemukakan bahwa pariwisata adalah sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari tempat tinggal semula ke tempat yang bukan tempat tinggal aslinya dan tidak untuk menetap di daerah tersebut, yang tujuannya hanya untuk bersenang – senang, menikmati liburan, atau bahkan untuk memenuhi rasa ingin tahu dan menjadikan sebuah pengalaman perjalanan hidupnya.

B. Jenis – Jenis Pariwisata

Ada beberapa jenis jenis pariwisata menurut Pendit dalam (Suriadi,2017) adalah sebagai berikut:

1. Wisata Budaya, yaitu wisata yang dilandasi dengan keinginan sendiri untuk menikmati pandangan seseorang dengan mengadakan kunjungan dari suatu daerah ke ddaerah yang lain dengan mempelajari adat, kebiasaan dan budaya di daerah tersebut.

2. Wisata Cagar Alam, yaitu wisata yang diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengatur perjalanan wisatawan untuk menikmati daerah cagar alam, taman lindung, huta di daerah pegunungan.
3. Wisata Olahraga, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga.
4. Wisata Industri, yaitu wisatawan (pelajar dan mahasiswa) datang kesuatu kompleks kawasan industri pabrik – pabrik terbesar, yang bertujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
5. Wisata Pertanian, yaitu wisatawan mengunjungi perjalanan ke proyek – proyek pertanian, perkebunan. Adapun wisatawan dapat melakukan penelitian atau hanya sekedar ingin menikmati udara segar dan sejuk dan suburnya pembibitan dalam tempat yang dikunjungi.

C. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Menurut Sunaryo dalam (Khotimah, 2017) menjelaskan bahwa yang harus dimiliki dalam pengembangan destinasi pariwisata dari komponen – komponen yaitu;

1. ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) yaitu harus adanya keunikan tersendiri untuk menarik perhatian para pengunjung wisata yang berbasis kebudayaan, alam sekitar, dan buatan.
2. Aksebilitas, yaitu kemudahan sarana dan sistem transportasi

3. Fasilitas Umum, yaitu dapat menunjang kegiatan obyek wisata tersebut.
4. Kelembagaan, yaitu adanya kewewenangan dan tanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan obyek wisata yang akan direalisasikan.

D. Kelembagaan Pariwisata

Menurut “Undang – undang Kepariwisata No. 10 tahun 2009” yang mengatakan bahwa pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. Menurut Sunaryo dalam (Khotimah, 2017) menjelaskan peran dan fungsi dari komponen aktor – aktor kepentingan yang ikut serta dalam pengembangan pariwisata yaitu;

1. Pemerintah dalam industri pariwisata, pemerintah disini menjadi regulator, fasilitator dan juga ikut serta terlibat dalam urusan manajemen pengembangan pariwisata tersebut.
2. Pihak Swasta dalam industri pariwisata, sektor swasta disini berperan sebagai penyedia barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pariwisata.
3. Masyarakat dalam industri pariwisata, masyarakat disini mempunyai wilayah tersebut atau bisa disebut tuan rumah sehingga sangat berperan aktif dalam pengembangan wisata tersebut. Adapun masyarakat setempat diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dalam pelaksanaan pariwisata.

Pariwisata dapat disimpulkan dalam batasan – batasan yang tertera diatas adalah sebuah fasilitas umum dapat dinikmati oleh siapapun yang

telah disediakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun sekelompok orang yang melakukan aktivitas perjalanan panjang dari daerah satu ke daerah lain yang bertujuan untuk mencari pengalaman dalam hidupnya, yang sifatnya untuk bersenang – senang. Dalam pengembangan pariwisata mempunyai komponen seperti untuk menarik para pengunjung dengan keunikan dan ciri khas yang ditawarkan, fasilitas pendukung, serta akses jalan transportasi.

2. Jejaring (*Networking*)

A. Definisi Jejaring

Jejaring adalah suatu sekumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama. Selain itu juga adanya keterikatan di kedua pihak saling melengkapi satu sama lain dalam buku Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan (Arsyad, 2015).

Menurut Lukiasuti dalam (Sidiq, 2018), Jejaring yaitu sebagai hubungan interaksi anatar individu maupun kelompok terkait mengenai pola anatar pelaku – pelaku yang terlibat.

Adanya partisipasi serta relasi yang kuat yang terjalin diantara para stakeholder Menciptakan jejaring (*networking*) yang kuat pula, penting akan adanya jejaring (*networking*) adalah untuk mewujudkan pemerintah yang multi-Organisasi yang mana pendapat ini disetujui oleh para akademisi dan juga para praktisi. Adapun keuntungan dari terciptanya Jejaring menurut provan dalam (Zaenuri, 2018) ini

mencakup banyak pihak, diantaranya pihak swasta, pemerintahan dan juga masyarakat umum. Salah satunya keuntungan jejaring yaitu meningkatnya pembelajaran dan lebih efisien dalam menangani masalah yang kompleks.

B. Proses Jejaring

Dalam proses jejaring (*Networking*) mempunyai indikator menurut teori Zaenuri (2018: 224-236) dalam buku Tata Kelola Pariwisata – Bencana Berbasis *Collaborative Governance* yaitu;

1. Inisiasi dalam Melakukan Jejaring, keterlibatan dan membuat jejaring diantara pihak – pihak yang berperan andil dalam pemangku kepentingan (*stakeholder*) di suatu program atau *event*. Dalam tahap inisiasi melakukan jejaring pihak – pihak menganalisa kesenjangan atau masalah – masalah yang terjadi, dan program atau *event* apa yang ingin dilakukan di lokasi objek wisata tersebut.
2. Pelaksanaan Jejaring, dalam tahap ini peran *stakeholder* dapat menyelenggarakan suatu program atau event yang telah disepakati pada saat inisiasi jejaring di di lokasi objek wisata tersebut.
3. Keberlanjutan Jejaring, yaitu adanya upaya berkesinambungan dalam suatu program atau *event* yang telah di selenggarakan diantara pihak – pihak kepentingan (*Stakeholder*).

C. Pola Hubungan Jejaring

Hubungan Jejaring (*Governance network*) lebih mengarah kepada jaringan para aktor seperti administrasi, organisasi kepentingan, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam hubungan pemerintahan. Adapun definisi menurut Marin & Mayntz dalam (Zanna, 2016) *Governance network* adalah aktor publik, swasta, yang saling ketergantungan satu sama lain pada sumber daya yang dan kapasitas dalam menyelesaikan sesuatu, secara operasional, dan mereka bertindak bukan dari atasan melainkan dengan cara tertentu.

Berdasarkan definisi pola hubungan *stakeholder* dalam jejaring menurut teori Myntz dalam (Zanna, 2016), yaitu sebagai berikut:

1. Peran stakeholder, mengidentifikasi aktor kepentingan dalam proses jejaring mana yang lebih mendominasi pemerintah atau swasta .
2. Hubungan saling ketergantungan, mengidentifikasi tingkat hubungan stakeholder dalam proses jejaring, sudah berjalan dengan target atau belum.
3. Pengaturan jaringan sendiri, mengetahui jaringan sendiri, melainkan tidak diperintahkan otonom, karena adanya keinginan dari kedua aktor yang berkerjasama.
4. Negosiasi, mengidentifikasi dalam bernegosiasi untuk mengambil keputusan dalam kedua aktor tersebut.

5. Kepentingan yang sama dengan publik, aktor kepentingan ini mengidentifikasi dalam membuat peluang dan inovasi baru untuk menjalin kerjasama.

D. Prinsip Jejaring

Prinsip jejaring (*Networking*) ada empat yaitu saling menguntungkan diantara kedua pihak, saling berbagi pengalaman, saling berbagi memikul beban yang dihadapi, saling berbagi manfaat (Sholihatin, 2012).

Berdasarkan hubungan jejaring *stakeholder* menurut teori Knoke dan Klikinski dalam (Pratama, 2018), mempunyai tipe jejaring (*networking*) untuk mengetahui koneksi dan batasan – batasan yang terjadi di dalam aktor pemangku kepentingan (*stakeholder*) di konteks pariwisata terdapat tujuh jenis yaitu;

1. *Transfer Material Resources* yaitu, hubungan berupa transaksi bisnis yang di dalam transaksi tersebut terjadi jual- beli, tukar, ataupun dipinjamkan.
2. *Transfer Non – Material* yaitu, hubungan yang tidak melibatkan suatu barang tetapi melibatkan komunikasi dengan aktor kepentingan (*stakeholder*), biasanya berupa transfer informasi mengenai isu – isu yang ada dilapangan.

3. *Interaction* yaitu, hubungan ini berupa interaksi fisik maksudnya adalah dengan adanya pertemuan, percakapan, dan diskusi pada tempat, waktu yang sama.
4. *Individual evaluations* yaitu, hubungan yang terjalin anatar individu sehingga terciptanya suatu hubungan, yang dimaksud adalah hubungan pertemanan, persahabatan, saling peduli diantara kedua pihak.
5. *Formal Roles* yaitu, hubungan yang meliputi kekuasaan dan kewenangan, sehingga aktor yang satu mampu mengendalikan aktor – aktor lainnya.
6. *Movement* yaitu, perpindahan antara aktor satu ke aktor lainnya, seperti perpindahan Perusahaan A ke Perusahaan B.
7. *Kinship* yaitu, hubungan kekeluargaan yang terjadi dalam suatu keluarga.

Jejaring (*networking*) dapat disimpulkan adalah sebuah relasi kerjasama jejaring diantara pihak – pihak pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang ikut serta terlibat dalam inisiasi jejaring, pelaksanaan jejaring, dan keberlanjutan jejaring. Adapun dalam melakukan jejaring yaitu dapat bertukeran ide atau gagasan serta dapat melengkapi dan menguntungkan diantara pihak yang terlibat. Selain itu juga adanya keinginan dalam tujuan yang sama, sehingga keduanya saling ketergantungan satu sama lain dalam

memberikan pelayanan publik yang baik, salah satunya dalam sektor pariwisata.

3. *Public Private Partnership (PPP)* atau **Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)**

A. Definisi *Public Private Partnership (PPP)*

Definisi mengenai tentang Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) tidak dapat di definisikan secara tunggal yang diterima secara internasional, sehingga dalam buku (*Kemitraan Pemerintah Swasta Panduan Referensi*, 2014) secara luas yaitu, suatu kontrak kerjasama jangka panjang antara suatu badan pemerintah sebagai regulator dan pihak sektor swasta untuk menyediakan aset seperti pelayanan publik. Sehingga kontrak kerjasama tersebut, pihak sektor swasta dapat menanggung segala resiko dan tanggungjawab dalam hal pemberian upah/biaya serta penghargaan kepada pengelola berdasarkan kinerja penyedia pelayanan publik.

Menurut (Felsing Klaus, 2008:1) dalam buku *Public-Private Partnership (PPP) Handbook*. Asian Development Bank, *Public-Private Partnership (PPP)* yaitu ;

“PPPs present a framework that-while engaging the private sector - acknowledge and structure the role for government in ensuring that social obligations are met and successful sector reforms and public investments achieved”.

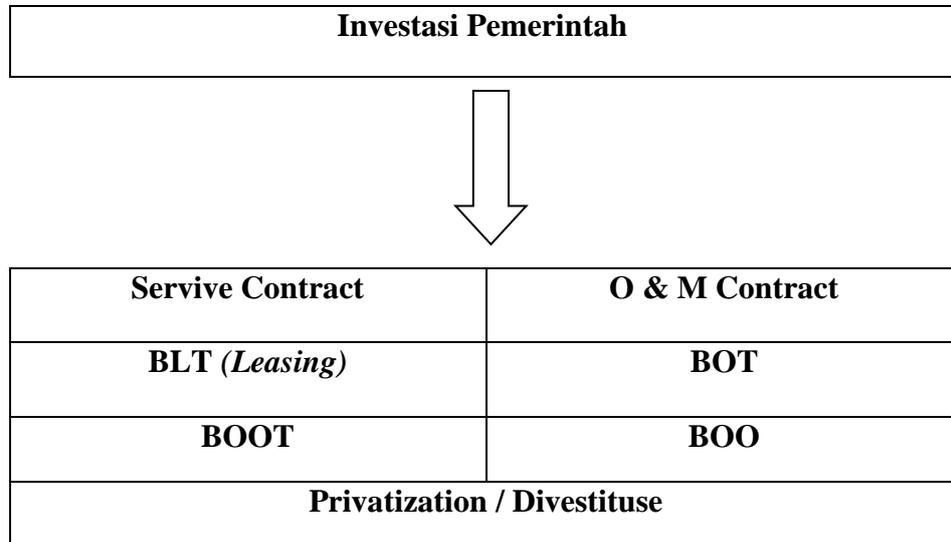
Public Private Partnership atau biasa disebut juga dengan Kerjasama Pemerintah Swasta menyajikan suatu kerangka kerja sementara yang melibatkan sektor swasta yang bertanggungjawab untuk urusan operasional, teknik dan design, dalam menjalankan bisnis, sedangkan peran pemerintah menjadi regulator yaitu membuat kebijakan ataupun peraturan dalam pembangunan penyediaan pelayanan publik untuk kepentingan umum.

Menurut Amirullah dalam (Al Azhar, 2013) menyatakan bahwa *Public Private Partnership* merupakan kerjasama dalam bentuk keseluruhan wewenang pemerintah kepada pihak swasta yang bertujuan melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur. Kerjasama merupakan sebuah konsep yang dilandasi oleh kepercayaan dalam sebuah kelompok kerja untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan satu sama lain di dalam anggota - anggota kemitraan, yang dimana anggota mitra selalu berusaha untuk menyelesaikan suatu konflik atau perselisihan secara prosedural sehingga masing – masing pihak akan saling menguntungkan satu sama lain.

B. Model *Public Private Partnership* (PPP)

Dalam buku Optimisme KPS di Indonesia (Shintya Roesly, 2013), dijelaskan bahwa model bentuk kerjasama pemerintah swasta ini dapat dilakukan melalui berbagai macam, model-model dari *Publik-private Partnership* (PPP) yaitu :

Gambar: 1.1



Sumber: Buku Optimisme KPS di Indonesia 2013

Penjelasan dari gambar bentuk model KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) diatas yaitu;

1. *Service Contract* (Kontrak Servis/jasa), yaitu kontrak kerjasama badan pemerintah dan pihak swasta hanya melakukan tugas tertentu. Jadi pihak swasta tidak mendapatkan porsi untuk hal manajemen tetapi hanya saja mengerjakan dalam hal penyediaan jasa pelayanan. Kontrak kerjasama biasanya antara satu sampai tiga tahun saja.
2. *O&M Contract* (Operasional dan Pemeliharaan), yaitu kontrak kerjasama kedua pihak dalam mengoperasikan dan menjaga pelayanan publik.
3. *BLT (Leasing)*, yaitu kontrak kerjasama untuk sementara dalam pengelolaan, pengoperasikan, pemeliharaan dengan menerima

pembayaran dari pihak pengguna fasilitas. Kontrak kerjasama biasanya antara delapan sampai dua puluh lima tahun.

4. BOT (*Build Operate Transfer*), yaitu kontrak kerjasama antara pemerintah dan swasta yang memberikan syarat kepada pihak swasta untuk membangun aset, sehingga dapat mengoperasikan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu pihak swasta dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat.
5. BOOT (*Build Own Operate Transfer*) pembangunan, kepemilikan, pengoperasian, dan pengalihan, yaitu kontrak kerjasama pada pihak swasta memiliki hak kebebasan secara eksklusif dalam hal membangun, mengoperasikan, mengelola, pengumpulan biaya pungutan selama waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Setelah itu kepemilikan tersebut dapat dialihkan kepada pihak pemerintah kembali.
6. BOO (*Build Own Operate*), yaitu kontrak ini badan pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan serta tanggungjawab kepada berbagai fasilitas yang sudah dimiliki, atau bahkan menjalankan kontrak kerjasama dengan sektor swasta untuk mengelola, membangun, mengoperasikan, serta pemeliharaan untuk fasilitas yang ingin dibangun bersama. Dengan begitu pihak swasta menyediakan dana atau modal untuk membangun fasilitas pelayanan umum.
7. *Privatization* atau *Deviestituse* yaitu, kontrak ini dalam penjualan set atau saham dan pengambilalihan manajemen yang mana badan

pemerintah tetap berperan sebagai fungsi regulasi dan mengontrol. Sedangkan pihak swasta berperan untuk meningkatkan fasilitas yang ada yang meliputi pengelolaan, pembangunan, dan dana sudah ditanggung olehnya.

Adapun dua model implementasi menurut Savas dalam (Rinaldi, 2016) dalam kerjasama badan pemerintah dengan pihak swasta yaitu; pemerintah secara penuh (*Fully Public*) dan swasta secara penuh (*Fully Private*).

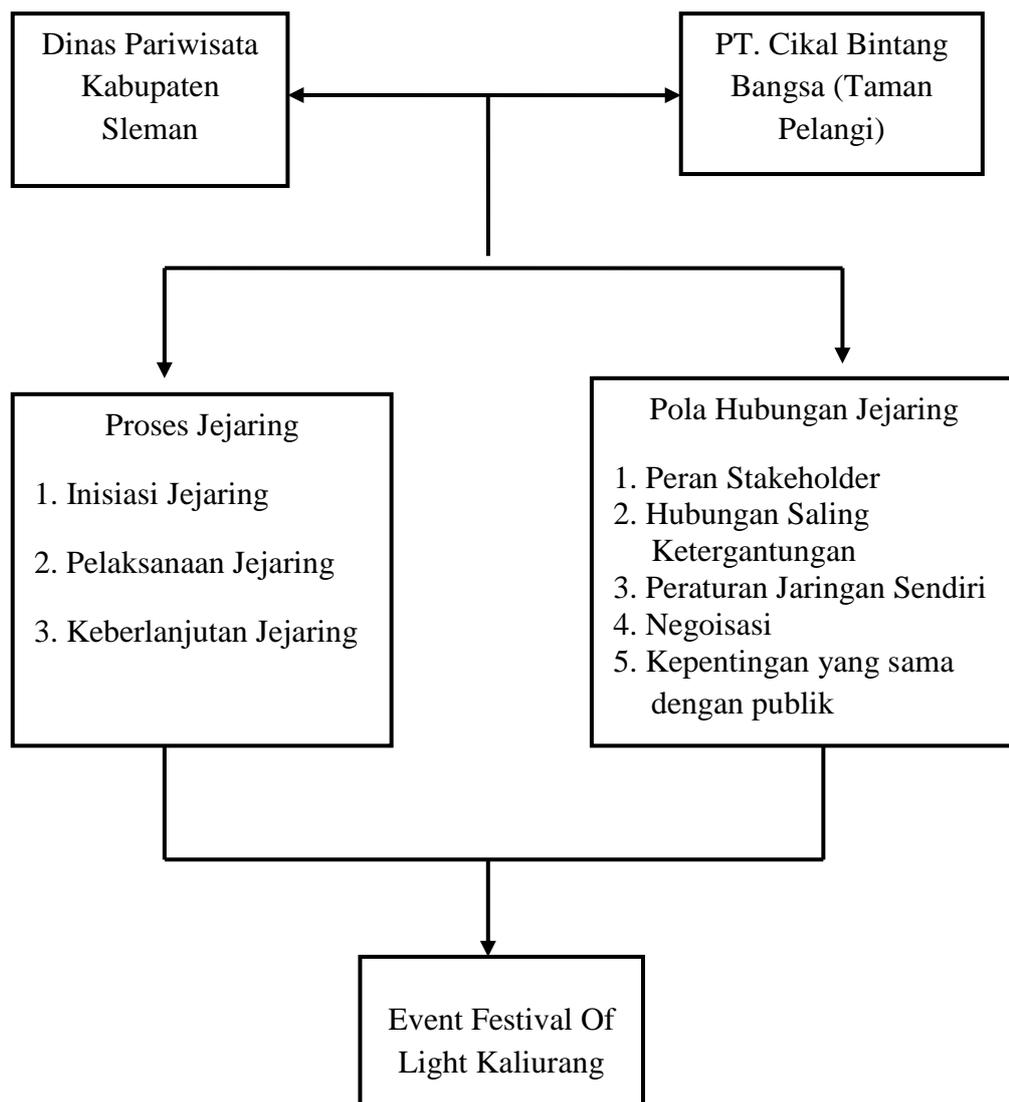
1. Pemerintah secara penuh (*Fully Public*) maksudnya yaitu peran pemerintah disini mempunyai kewenangan secara penuh dalam SOP (*Standar Operasional Prosedur*), kemudian pihak swasta mengisi item dalam pelaksanaannya. Jadi pemerintah membuat kebijakan dan peran swasta yang melaksakannya dalam penyediaan pelayanan publik.
2. Swasta secara penuh (*Fully Private*), yaitu kebalikannya peran swasta disini mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan atau SOP, dan badan pemerintah hanya menjadi pelaksana dan pengawasan secara operasional.

Public Private Partnership (PPP) dapat disimpulkan dari pemaparan diatas yaitu hubungan kontrak kerjasama yang bersifat sementara dan jangka panjang yang dilakukan oleh pelaku kepentingan (*stakeholder*) meliputi badan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Hubungan ini dilakukan secara terus menerus sampai dengan waktu yang telah disepakati diantara kedua pihak atau lebih. Adapun dalam menjalin

hubungan kerjasama ini memiliki porsinya masing – masing dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan, dalam implementasi kerjasama biasanya antara pemerintah secara penuh atau swasta secara penuh. *Public Private Partnership (PPP)* ini memiliki bentuk dalam kerjasama yaitu ; *service contrat*, *O&M Contract*, *BLT (leasing)*, *BOT*, *BOOT*, *BOO*, *Privatization/Divestituse*.

1.7. Kerangka Pikir

Gambar: 1.2



Berdasarkan gambar kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mempunyai ide gagasan dalam meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan nusantara maupun mancanegara dan pendapatan daerah di kawasan Gardu Pandang Kaliurang. Kemudian Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mengajak PT. Cikal Bintang Bangsa selaku pengelola Taman Pelangi untuk melakukan proses kerjasama jejaring tersebut. Kedua pihak antara pemerintah dan swasta saling mengkoordinasi satu sama lain dan adanya timbal balik diantara keduanya. Setelah itu dalam proses jejaring dapat melakukan tiga proses yaitu; inisiasi dalam melakukan jejaring, melaksanakan jejaring, dan keberlanjutan jejaring. Adapun pola hubungan *stakeholder* dalam melakukan proses jejaring. Sehingga terciptalah sebuah wisata di malam hari di kawasan Gardu Pandang Kaliurang dengan *Event Festival Of Light Kaliurang* yang dapat dinikmati oleh pengunjung nusantara dan mancanegara.

1.8. Definisi Konseptual

- a. Pariwisata,** adalah sebuah fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun sekelompok orang yang melakukan aktivitas perjalanan panjang dari daerah satu ke daerah lain yang bertujuan untuk mencari pengalaman, menikmati alam sekitar, yang sifatnya untuk bersenang – senang.

b. Jejaring (*Networking*), adalah sebuah relasi kerjasama jejaring diantara pihak – pihak pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang ikut serta terlibat dalam inisiasi jejaring, pelaksanaan jejaring, dan keberlanjutan jejaring.

c. *Public Private Partnership (PPP)*

Public Private Partnership (PPP) atau biasa disebut dengan kata Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), merupakan hubungan kontrak kerjasama yang bersifat sementara atau jangka panjang yang dilakukan oleh pelaku kepentingan (*stakeholder*) meliputi badan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Peran atau aktor pemangku kepentingan (*stakeholder*) memiliki porsinya masing – masing ikut serta dalam kerjasama jejaring pembangunan, pengembangan dan penguatan pariwisata.

1.8 Definisi Operasional

Dengan membatasi ruang lingkup penelitian ini dan menyamakan persepsi dengan batasan yang digunakan, maka berikut ini variabel diuraikan dengan cara mengenakan indikator yang digunakan dan diukur menggunakan parameter. Sehingga yang menjadi variabel, indikator dan parameter proses jejaring pemerintah swasta dalam penulisan proposal penelitian ini yaitu :

Tabel: 1.2

Variabel	Indikator	Parameter
Proses Jejaring (<i>Networking</i>)	Inisiasi dalam melakukan Jejaring	Mengidentifikasi aktor - aktor yang terlibat serta menyatukan keinginan dan tujuan bersama, menemukan masalah dan di selesaikan untuk mencari sebuah solusi dengan membuat kesepakatan perjanjian untuk melakukan proses kerjasama jejaring.
	Pelaksanaan Jejaring	Mengidentifikasi kontrak kerjasama jejaring dalam membuat sebuah event yang ingin di selenggarakan dan melihat kendala – kendala saat proses pelaksanaan jejaring berlangsung.
Pola Hubungan Jejaring (<i>Networking</i>)	Keberlanjutan Jejaring	Mengevaluasi event serta melihat respond pengunjung terhadap event yang telah diselenggarakan .
	Peran stakeholder	Mengetahui peran dan pihak mana yang lebih mendominasi
	Hubungan Saling Ketergantungan	Mengidentifikasi tingkat hubungan atau koordinasi kedua pihak
	Pengaturan Jaringan Sendiri	Mengetahui pengaturan jaringan sendiri
	Negoisasi	Mengetahui interaksi dalam bernegoisasi mengambil keputusan
	Kepentingan yang sama dengan publik	Mengidentifikasi dalam mencari peluang baru (Inovasi)

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, lebih menonjolkan proses dan makna. Penelitian kualitatif ini memiliki beragam metode yang saling terkait, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman atas pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi (Salim A , 2006).

1.10.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lokasi Kabupaten Sleman, yang meliputi Dinas, Intansi, Lembaga, dan yang berhubungan langsung dalam penguatan pariwisata daerah berbasis jejaring di *Event Festival Of Light Kaliurang*.

Tabel: 1.3

No	Nama	Urusan	Lokasi
1	Dinas Pariwisata	Aktor pemangku kepentingan dalam penguatan pariwisata daerah berbasis jejaring	Kabupaten Sleman
2	PT. Cikal Bintang Bangsa	Aktor pemangku kepentingan dalam	Kabupaten Sleman

		penguatan pariwisata daerah berbasis jejaring	
3	Obyek Wisata Festival Of Light Kaliurang	Obyek wisata dalam penguatan pariwisata daerah berbasis jejaring	Kabupaten Sleman

1.10.3 Unit Analisis Data

Unit analisis data penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah, maka penelitian ini menyusun unit analisa data pada pihak-pihak yang terkait yaitu, proses kerjasama dalam jejaring antara Dinas Pariwisata kabupaten Sleman dan PT. Cikal Bintang Bangsa, Masyarakat Hargobinangun di *Event Festival Of Light Kaliurang*.

1.10.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang benar – benar langsung di peroleh dengan cara lain menggantikan (*alternatif*) data sekunder, dan apabila data sekunder kurang akurat bisa dicari menggunakan data primer. Data primer ini sebelumnya tidak tersedia dari media manapun, karena belum ada yang mencari data – data tersebut. Jika data itu ada, data tersebut sudah tidak kadaluarsa untuk mengetahui data terbaru (*ter up to date*). Data primer ditunjukkan dari informasi melalui wawancara. Data primer yaitu data yang diterima oleh peneliti langsung atau (tangan pertama) dalam memperoleh data yang dicari. (Istijanto, 2005). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.4

No	Nama Data	Sumber Data	Metode
1	Mekanisme kontrak kerjasama dalam proses jejaring	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan PT. Cikal Bintang Bangsa	Wawancara
2	Pola hubungan kedua pihak dalam proses jejaring	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan PT. Cikal Bintang Bangsa	Wawancara
3	Bentuk koordinasi kedua pihak dalam proses jejaring	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan PT. Cikal Bintang Bangsa	Wawancara
4	Kendala – kendala dalam proses jejaring	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan PT. Cikal Bintang Bangsa	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua atau bisa disebut dengan (tangan kedua), bukan data dari hasil temuan periset sendiri dilapangan. Data sekunder biasanya data yang bersifat informasi sekilas dari pihak – pihak yang bersangkutan (Istijanto, 2005). Tetapi tidak hanya itu, data sekunder di didapatkan dari data pengunjung , data pendapatan event festival of light kaliurang, kesepakatan perjanjian kerjasama nomor 506/544 tentang penyelenggaraan festival of light kaliurang event lebaran 2018, yaitu sebagai berikut;

Tabel: 1.5

No	Data	Sumber Data
1	Data Pengunjung Event Festival Of Light Kaliurang	Dokumentasi
2	Data Pendapatan Event Festival Of Light Kaliurang	Dokumentasi
3	Kesepakatan Perjanjian kerjasama Nomor 506/544 tentang Penyelenggaraan Festival Of Light Kaliurang Event Lebaran 2018	Dokumentasi

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan sumber – sumber data primer maupun data sekunder. Peneliti menggunakan metode kualitatif, yang dimana dapat memperoleh data – data yang diinginkan dan langsung dari (tangan pertama) atau sumbernya yang sudah terjamin akurat, jelas dan spesifik. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara, data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara lebih detail. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara diperlukan ketrampilan seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. (Salim, 2006). Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui tanya jawab dengan pihak – pihak yang terkait dengan acara event festival of light kaliurang.

Tabel 1.6 Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Kus Endarto	Kepala Bidang Pemasaran	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
2	Dewi Setiawati	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
3	Nurin	Kepala Bidang Keuangan	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
4	Agus	Kepala Pengelola Event Festival Of Light Kaliurang	PT. Cikal Bintang Bangsa
5	Tary	Marketing Event Festival Of Light Kaliurang	PT. Cikal Bintang Bangsa
6	Budi	Selaku Pimpinan Proyek Event Festival Of Light Kaliurang	PT. Cikal Bintang Bangsa

7	Tardji	Masyarakat dan Pengelola Parkir	Masyarakat Hargobinangun
8	Krisna Saputra	Masyarakat dan Pengelola Parkir	Masyarakat Hargobinangun
9	Kasiman	Masyarakat dan Penjual	Masyarakat Hargobinangun

b. Dokumentasi

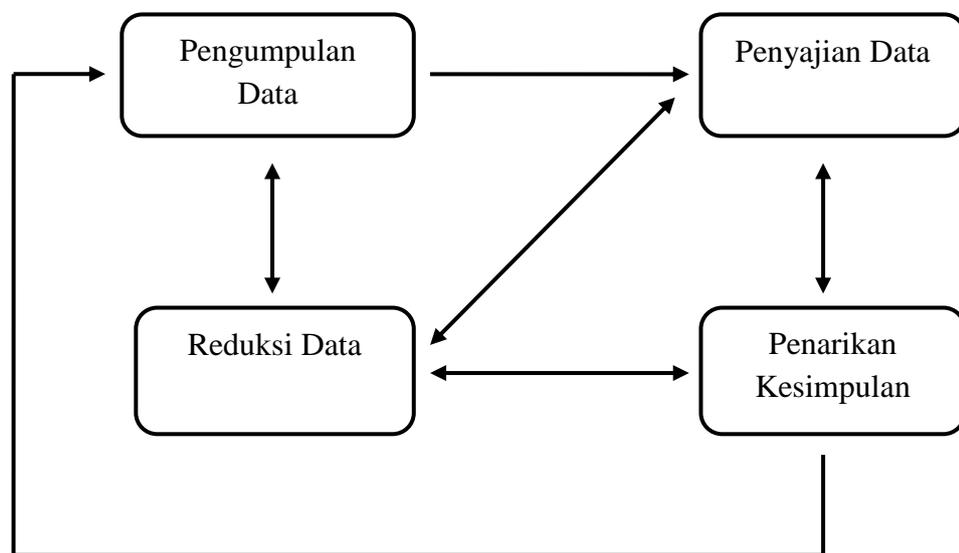
Dokumentasi menurut Bugin dalam (Nilamsari, 2014) adalah sebuah data yang terbagi menjadi dua yaitu, data resmi dan data pribadi. Data resmi terdapat dua jenis yaitu data internal dan data eksternal. Data internal biasanya berbentuk peraturan daerah, sedangkan data yang eksternal seperti data – data yang ada di media pemberitahuan (buletin, berita online maupun tulisan di koran) yang dapat diakses oleh semua orang. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh fakta – fakta yang ada sebenarnya yang dianggap valid. Karena obyek yang menjadi sasaran peneliti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dokumen dalam penelitian ini untuk memperoleh data pengunjung, data pendapatan, dan perjanjian kerjasama (Mou) Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan PT. Cikal Bintang Bangsa.

1.10.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada empat komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Adapun penelitian di *Even Festival Of Light Kaliurang* kepada pihak pemerintah dan sektor swasta (PT. Cikal Bintang Bangsa) terkait mengenai proses kerjasama. Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif karena memiliki proses – proses analisis dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (salim,2006) yaitu;

Gambar: 1.3



Sumber: Miles dan Huberman dalam (Salim, 2006)

1. Pengumpulan Data, yaitu mencari data yang dibutuhkan di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, PT. Cikal Bintang Bangsa, dan obyek wisata *event festival of light kaliurang* dengan metode teknik wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini terkait mengenai dari data pengunjung wisata, proses kerjasama yang dilakukan, dan keterlibatan diantara para aktor. Dalam pengumpulan data dibutuhkan sebuah startegi untuk memperoleh data yang lebih mengerucut dan mendukung sebuah penelitian tersebut.

2. Reduksi Data, yaitu merupakan proses seleksi, dan penyederhanaan data – data kasar yang telah diperoleh dari lokasi penelitian dan dilanjutkan dengan waktu pengumpulan data. Setelah itu reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian di *Even Festival Of Light Kaliurang* Kabupaten Sleman.
3. Penyajian Data, yaitu dilakukan dengan menggambarkan keadaan berbagai informasi yang telah diperoleh di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, PT. Cikal Bintang Bangsa, dan obyek wisata *event festival of light kaliurang*. Penyajian data disajikan dengan cara menggambarkan dengan media tabel, ataupun grafik yang mudah dipahami.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dari data – data yang telah di reduksi, dan diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, PT. Cikal Bintang Bangsa, dan obyek wisata *event festival of light kaliurang*. Penarikan kesimpulan dapat menggabungkan dan memilah data yang dapat menjawab sebuah permasalahan yang telah dirumuskan dan sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.